

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Gaffar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*, Pustaka Relaja, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Akhmad Khairuddin, 2010, *Fenomena Keadilan dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme , dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Bhenyamin Hoessain, 2009, *Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dwiyanto, A., *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Yogyakarta: UGM Press, 2006, Jakarta
- Setya Nugraha, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya.
- Fahmi Amrusi, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspective, Bandung, Nusa Media, Bandung, hlm.
- H.Kriswahyu (et.al.), 2017, *Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei Ombudsman RI*, Ombudsman RI, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 2010 *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Irwan Sudjito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Joko Prakoso, 1984, *Kedudukan dan Fungs Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Lainnya didalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Ghalia Indah, Jakarta.

- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Laica Marzuki, 2005, *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum*, Konsitusi Press, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2010, *Problematisasi Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Rahman Mulyawan, 2016, *Birokrasi dan Pelayanan Publik*, UNPAD PRESS, Bandung.
- Sadu Wastiono, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus Media, Bandung.
- Setya Retnami, 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta.
- Sinambela, L.P, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- The Liang Ge, 1967, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Jurnal :

- Annisa Nur, 2018, "Penerapan Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Unit Layanan Pengadaan (BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA) Kabupaten Maros", Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Aprilia Malik, Siswidiyanto, Endah Setyowati, Perencanaan Program Akta Online dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Voll. No.5 Maret 2012.
- Fitria Untari, 2018, "Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak

Daerah Kota Malang)”, Skripsi, Sarjana Sosial Politik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Indonesia Corruption Watch, 2021, Satu Dekade Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia: Analisis Tender 2011-2020 & Pemanfaatan Opentender.net oleh Publik.

Listriyanti Palangda, “Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik”, Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Negeri Manado, September 2020.

Mutmainnah Dian, 2018, “Transparansi Penyediaan Barang dan Jasa dalam Penerapan E-Government Di Sekretariat Kabupaten Toraja Utara”, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm

Nasrullah, “Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar)”, Jurnal Jusiti, Program Studi Teknik Informatika STMIK Handayani Makassar, Februari 2017

Selvi Rianti, “Kualitas Pelayanan Publik”, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Vol. 15, Nomor 3 Juli 2019.

Perundang-undangan :

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Website :

<https://samsat-sungailiat.babelprov.go.id/content/pelayanan-publik->

[%E2%80%9C-apa-dan-mengapa-ada-pelayanan-publik-](#)

[%E2%80%9D](#) diakses dari website Samsat Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 5 oktober 2022 pukul

17.35 WITA.

https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi diakses dari website Kementerian Sekretariat Negara Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 18.18 WITA.

<https://sulselprov.go.id/welcome/post/aplikasi-e-government-menuju-good-governance> diakses dari website Pemerintahan Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Februari 2023 pukul 19.05 WITA.

<https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government> diakses dari websit DISKOMINFO Kabupaten Badung pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 18.58 WITA.

<https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government> diakses dari website Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 20.51 WITA.